



Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, dan investasi terhadap kapasitas fiskal daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

The effect of populations, gross regional domestic product, and investment on the local fiscal capacity of Districts/Cities in Central Java Province

Ernawati*, Sri Mulyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Abstrak

Kapasitas fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dan mengelola sumber keuangan secara optimal. Pada tahun 2022–2023 sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan kapasitas fiskal daerah, sehingga diperlukan analisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), dan investasi terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data panel yang menggabungkan data cross-section dari 35 kabupaten/kota dan data time series selama lima tahun. Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) melalui software E-Views versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan, PDRB berpengaruh negatif signifikan, dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Kapasitas Fiskal Daerah.

Abstract

Local fiscal capacity reflects the ability of local governments to collect and manage financial resources optimally. In 2022–2023, most districts/cities in Central Java experienced a decline in fiscal capacity, thereby requiring an analysis of the influencing factors. This study aims to analyze the effect of population, gross regional domestic product (GRDP), and investment on the local fiscal capacity of districts/cities in Central Java Province during the period 2019–2023. The research employs a quantitative, descriptive approach using panel data, combining cross-sectional data from 35 districts/cities with time-series data over five years. The analysis was conducted using panel data regression with the Fixed Effects Model (FEM) in E-Views version 12. The results show that population has no significant effect, GRDP has a significant negative effect, and investment has a significant positive effect on local fiscal capacity. Simultaneously, these three variables have a significant influence on the local fiscal capacity of districts/cities in Central Java Province.

Keywords: Population, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Investment, Local Fiscal Capacity.

Histori Artikel:

Diterima 28 September 2025, Direvisi 17 November 2025, Disetujui 19 November 2025, Dipublikasi 1 Desember 2025.

***Penulis Korespondensi:**

ernawati21001@mail.unpad.ac.id

DOI:

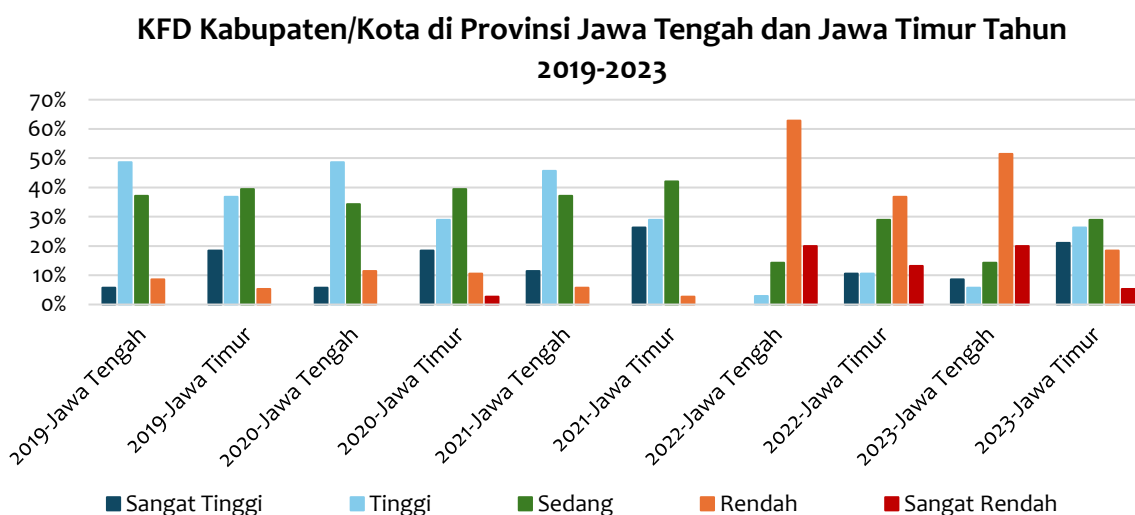
<https://doi.org/10.60036/jbm.888>

PENDAHULUAN

Kapasitas fiskal daerah (KFD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun, mengelola, dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan secara efisien dan berkelanjutan (Herdiyana, 2019). Kapasitas fiskal daerah dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari desentralisasi fiskal. Dengan menggunakan kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah dapat melihat seberapa besar potensi ekonominya dapat digunakan untuk sumber penerimaan daerah (Lisnawati, 2018).

Tingkat kapasitas fiskal daerah diukur menggunakan rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) yang dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (Kementerian Keuangan, 2023). Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya sendiri, khususnya dalam menghasilkan PAD. Semakin besar PAD suatu daerah, maka akan semakin baik pula kapasitas fiskalnya. Jika pemerintah daerah memiliki KFD yang tinggi, maka pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan infrastruktur baru yang lebih baik dan memberikan layanan terbaik kepada publik tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi, dan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak, yaitu 35 daerah. Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun kapasitas fiskal daerah yang dimilikinya masih menghadapi tantangan. Pada tahun 2022–2023, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori rendah hingga sangat rendah.



Gambar 1. Grafik Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2019-2023

Sumber: PMK No. 84 Tahun 2023, PMK No. 193 Tahun 2022, PMK No. 116/PMK.07/2021, PMK No. 120/PMK.07/2020, PMK No. 126/PMK.07/2019 (data diolah, 2025)

Kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan pada periode 2019–2023. Pada tahun 2019–2020 terdapat 49% daerah masuk kategori tinggi, dan 46% daerah pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022–2023 proporsi daerah dengan kategori rendah meningkat signifikan menjadi 63% dan 51%. Sebaliknya, Jawa Timur memperlihatkan pola berbeda, di mana meskipun kategori rendah naik pada tahun 2022, pada tahun 2023 kategori sedang dan tinggi kembali mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur.

Kota Semarang masuk kategori kapasitas fiskal tinggi tahun 2022, sementara kategori sedang terdiri dari Kabupaten Brebes, Grobogan, Purworejo, Temanggung, dan Kota Surakarta.

Selebihnya berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Penurunan tersebut dipicu beban pengeluaran besar pemerintah pusat akibat pandemi COVID-19 dan krisis energi, sehingga dana transfer ke daerah terbatas (Talattov et al., 2023). Sementara itu, pemerintah daerah tetap harus memenuhi belanja wajib. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Sebagian besar daerah juga memiliki rasio kemandirian fiskal di bawah 25 persen, mencerminkan rendahnya kontribusi PAD dalam menutupi kebutuhan belanja daerah serta belum optimalnya intensifikasi pajak dan penguatan kelembagaan fiskal (Oktavilia et al., 2020; Suryahadi & Santosa, 2024).

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan investasi merupakan faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah, namun hasilnya inkonsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan investasi berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah (Ardiansyah & Yuliawan, 2024; Mirsan et al., 2019; Syaifullah, 2021; Wondiwoi et al., 2017). Sementara beberapa penelitian lainnya menyatakan tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah (Abdulfatah & Mulyani, 2024; Kiziltan & Yereli, 2023; Putri et al., 2014; Widyaningsih, 2018).

Jumlah penduduk merupakan salah satu parameter penting yang memengaruhi dinamika suatu negara. Keberadaan jumlah penduduk diperlukan untuk menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas cakupan pasar serta memperkuat struktur perekonomian suatu negara (Desmawan et al., 2023). Peningkatan jumlah penduduk berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan produksi, yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 28 ayat 3, PAD dan DBH merupakan sumber pembiayaan bagi kapasitas fiskal daerah. Peningkatan nilai PDRB menjadi salah satu parameter yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan di daerah. Peningkatan PDRB dapat mendorong kenaikan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah, sehingga mendorong peningkatan PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah (Ardiansyah & Yuliawan, 2024)

Pembiayaan pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya dapat ditanggung oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan dukungan sektor swasta melalui investasi baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA berupa investasi langsung seperti pembangunan pabrik serta investasi tidak langsung melalui pasar modal. Sedangkan PMDN berfungsi sebagai pembiayaan domestik untuk mendorong kegiatan ekonomi. Investasi diperlukan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa yang meningkat akibat pertumbuhan penduduk, mendorong kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan melalui pajak daerah dan retribusi daerah (Buana et al., 2018).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Oki, 2019; Syaifullah, 2021; Wondiwoi et al., 2017). Namun, yang membedakan adalah penelitian ini menambahkan variabel investasi yang akan dianalisis. Seiring dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah mendorong pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) sebagai instrumen untuk memperkuat keberlanjutan fiskal jangka panjang. Hanya daerah dengan kapasitas fiskal baik yang dapat membentuk, mengelola dan memanfaatkan DAD.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mencakup hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya, yang

dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai daerah otonom apabila memenuhi sejumlah kriteria, seperti memiliki kemampuan dalam perekonomian, memiliki potensi daerah yang memadai, kondisi sosial budaya yang mendukung, stabilitas politik, jumlah penduduk yang mencukupi, luas wilayah tertentu serta sistem pertahanan yang memadai, disertai faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya pemerintah daerah secara mandiri.

Pemerintah daerah otonom memperoleh kewenangan untuk mengelola dan menata seluruh aspek pemerintahan, kecuali kewenangan yang ditangani oleh pemerintah pusat, antara lain hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan, sistem peradilan, kebijakan fiskal dan moneter nasional, serta urusan keagamaan (Soemantri, 2014) Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh tingkat kapasitas fiskal masing-masing daerah, karena kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kewenangan otonominya secara mandiri dan berkelanjutan.

Ekonomi Publik

Ilmu Ekonomi Pulik dapat diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi atau peran pemerintah dalam perekonomian termasuk dalam mengkaji berbagai urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, masyarakat umum, dan penyelenggaraan pemerintahan atau negara (Ridwan & Nawir, 2021). Menurut (Musgrave & Musgrave, 1989)terdapat tiga tugas atau peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai menjaga stabilitas, memutuskan bagaimana barang akan dialokasikan, dan mendistribusikan barang.

Tugas pertama, ekonomi publik menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga agar perekonomian berada pada kondisi kesempatan kerja penuh (*full employment*) serta memastikan kestabilan harga. Tugas kedua berarti pemerintah memutuskan bagaimana alokasi sumber daya yang dimiliki dalam perekonomian. Tugas ketiga adalah bagaimana pemerintah mencoba dalam mendistribusikan barang atau produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggotanya. Ilmu Ekonomi Publik berfokus pada telaah tentang dua peran terakhir di antara tiga peranan pemerintah menurut pendapat Musgrave.

Kapasitas Fiskal Daerah

Mengacu pada PMK Nomor 84 Tahun 2023 mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal daerah merupakan sebuah gambaran mengenai kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah, yang dihitung dengan cara menjumlahkan antara pendapatan dengan penerimaan pembiayaan tertentu yang kemudian dikurangkan dengan pendapatan yang telah ditetapkan penggunaannya, belanja tertentu serta pengeluaran pembiayaan tertentu.

Tabel 1. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 0,947$	sangat rendah
$0,947 \leq RKFD < 1,203$	rendah
$1,203 \leq RKFD < 1,459$	sedang
$1,459 \leq RKFD < 1,715$	tinggi
$1,715 \leq RKFD$	sangat tinggi

Sumber: PMK No. 84 Tahun 2023

Menurut PMK No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas fiskal Daerah dapat digunakan sebagai:

- a. Sebagai pertimbangan ketika menetapkan daerah yang layak mendapatkan hibah. Hibah ini berasal dari pinjaman luar negeri, penerimaan dalam negeri, atau hibah luar negeri melalui skema pembiayaan awal (*pre-financing*).
- b. Sebagai acuan dalam menentukan besaran dana pendamping yang wajib disediakan pemerintah daerah apabila disyaratkan.
- c. Sebagai pertimbangan ketika memberikan fasilitas pembiayaan utang daerah, dan/atau;
- d. Digunakan untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Penduduk

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa penduduk merupakan warga negara Indonesia dan negara asing yang bermukim di Indonesia. Jumlah penduduk menggambarkan total orang atau masyarakat yang tinggal menetap secara permanen di suatu wilayah tertentu seperti desa, kota atau provinsi pada waktu tertentu (Fitri Yenny & Anwar, 2020). Sedangkan BPS mendefinisikan penduduk sebagai orang yang tinggal di Indonesia setidaknya satu tahun atau lebih, atau yang berencana untuk menetap selama satu tahun atau lebih.

Jumlah penduduk memiliki keterkaitan erat dengan kapasitas fiskal daerah karena memengaruhi potensi penerimaan PAD. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kualitas sumber daya manusia memadai mendorong aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi, sehingga meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi serta memperkuat kapasitas fiskal. Sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk tidak disertai peningkatan produktivitas dan infrastruktur, hal ini menjadi beban fiskal karena kebutuhan pembiayaan publik lebih besar dibandingkan penerimaan daerah (Desmawan et al., 2023; Oki, 2019).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menggambarkan nilai total ekonomi yang dihasilkan oleh semua pelaku usaha di suatu daerah atau dapat diartikan sebagai nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi selama periode tertentu. PDRB mencerminkan seberapa besar kemampuan ekonomi dalam suatu wilayah baik provinsi, kabupaten, dan kota dapat memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu (Fitri Yenny & Anwar, 2020)

PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu, di mana PDRB ADHK menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahunan tanpa memperhitungkan perubahan harga. Semakin tinggi nilai PDRB, semakin besar penerimaan daerah terutama dari pajak dan retribusi, yang akan mendorong kenaikan PAD serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Ambya et al., 2017; Istiningsih & Bawono, 2022).

Investasi

Menurut Sukirno (dalam Anggraini, 2018) investasi didefinisikan sebagai aktivitas pengeluaran modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh barang-barang modal dan sarana produksi lainnya guna, meningkatkan kapasitas dari produksi barang dan jasa dalam perekonomian daerah. Secara umum, investasi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian yang ditandai dengan bertambahnya barang dan jasa, seperti pengadaan mesin-mesin baru, pembangunan infrastruktur jalan, serta pemanfaatan lahan baru dan sejenisnya.

Investasi merupakan faktor penting dalam mendukung produksi dan pertumbuhan ekonomi, baik melalui penanaman modal domestik maupun asing, yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan

pendapatan masyarakat. Untuk menciptakan iklim investasi kondusif, pemerintah mengeluarkan regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN. Investasi yang masuk ke daerah akan memengaruhi sektor industri, perdagangan, dan jasa, sehingga menambah penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Amanda & Murwiati, 2025; Mutholifa, 2019).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif deskriptif, untuk menguji pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan investasi terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk data panel, yaitu kombinasi antara data *cross section* dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan data *times series* mencakup tahun 2019-2023 untuk variabel independen dan tahun 2020-2024 untuk variabel dependen, dengan mempertimbangkan adanya *time lag* satu tahun. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Tabel 2. Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Jumlah Penduduk (X1)	Jumlah penduduk adalah jumlah masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah dan menetap untuk mendiami suatu daerah pada suatu waktu tertentu (Fitri Yenny & Anwar, 2020).	Jumlah Penduduk = Ln (Jumlah penduduk)	Rasio
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2)	PDRB pada tingkatan daerah (provinsi/kabupaten/kota) melambangkan keahlian suatu daerah untuk menghasilkan <i>output</i> pada sesuatu waktu tertentu (Fitri Yenny & Anwar, 2020).	PDRB = Ln (Jumlah PDRB ADHK)	Rasio
3	Investasi (X3)	Menurut Sukirno (dalam Anggraini, 2018), investasi didefinisikan sebagai aktivitas pengeluaran modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh barang modal dan sarana produksi lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian.	Investasi = Ln (Jumlah Investasi)	Rasio
4	Kapasitas Fiskal Daerah (Y)	Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu (PMK No. 84 Tahun 2023)	KFD = (pendapatan + penerimaan pembiayaan) – (pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran). RKFD = KFD/Belanja Pegawai	Interval

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel (uji *chow*, uji *hausman*, uji *lagrange multiplier*), uji asumsi klasik (uji *normalitas*, uji *multikolinearitas*, uji *heteroskedastisitas*, uji *autokorelasi*), analisis koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis statistik t dan uji hipotesis statistik f. Dalam pengolahan data dilakukan menggunakan *software E-views* versi 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Model Regresi Data Panel

Tabel 3. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	4.413775	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	129.454407	34	0.0000

Berdasarkan hasil uji *chow*, nilai probabilitas *Cross-section Chi -Square* 0,0000 kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, sehingga model yang sesuai dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Dikarenakan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*, langkah berikutnya dalam penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan uji *hausman*.

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.f	Prob.
Cross-section random	28.559994	3	0.0000

Berdasarkan pada hasil uji *hausman*, probabilitas *Cross-section random* sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Dikarenakan model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*, maka uji *Lagrange Multiplier* tidak perlu dilakukan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	JP	PDRB	INV
JP	1.000000	0.666063	0.391002
PDRB	0.666063	1.000000	0.552776
INV	0.391002	0.552776	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai korelasi antara variabel jumlah penduduk dengan variabel PDRB sebesar 0,666063, antara variabel jumlah penduduk dengan variabel investasi sebesar 0,391002, dan antara variabel PDRB dengan variabel investasi sebesar 0,552776. Seluruh nilai korelasi berada di bawah 0,80 yang menandakan bahwa dalam model regresi tidak terdapat korelasi linear kuat antar variabel independen.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.53887	7.852289	1.851533	0.0662
JP	-0.448828	0.521864	-0.860047	0.3913
PDRB	-0.483313	0.360966	-1.338944	0.1828
INV	0.002111	0.016756	0.125963	0.8999

Pengujian menghasilkan temuan bahwa seluruh variabel independen, yang terdiri atas jumlah penduduk, PDRB, dan investasi memiliki nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,3913, 0,1828, dan 0,8999, dimana seluruh nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi tidak ditemukan.

Model Regresi Data Panel

Tabel 7. Model Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.65696	16.10613	4.076519	0.0001
JP	-1.255690	1.070416	-1.173086	0.2428
PDRB	-2.843665	0.740390	-3.840763	0.0002
INV	0.082296	0.034368	2.394556	0.0180

Persamaan regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KFD = 65.65696 - 1.25569*JP - 2.84367*PDRB + 0.08229*INV + [CX=F]$$

Berikut merupakan penjelasan mengenai persamaan regresi di atas:

1. Nilai konstanta sebesar 65,65696 menunjukkan apabila variabel jumlah penduduk PDRB dan investasi bernilai nol atau tidak mengalami perubahan, maka kapasitas fiskal daerah akan bernilai sebesar 65,65696.
2. Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar -1,25569 menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan kapasitas fiskal daerah sebesar 1,25569. Sebaliknya, jika variabel jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka kapasitas fiskal daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,25569.
3. Koefisien regresi variabel PDRB sebesar -2,84367 menunjukkan bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi konstan, maka kapasitas fiskal daerah akan mengalami penurunan sebesar 2,84367. Sebaliknya, jika PDRB mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka kapasitas fiskal daerah akan mengalami peningkatan sebesar 2,84367.
4. Koefisien regresi variabel investasi sebesar 0,08229, menunjukkan bahwa setiap peningkatan investasi sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi konstan, maka kapasitas fiskal daerah akan meningkat sebesar 0,08229. Sebaliknya, jika investasi mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka kapasitas fiskal daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,08229.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.620360	Mean dependent var	1.278805
Adjusted R-squared	0.517830	S.D. dependent var	0.555097
S.E of regression	0.385451	Akaike info criterion	1.120673
Sum squared resid	20.35438	Schwarz criterion	1.807884
Log likelihood	-60.05890	Hannan-Quinn criter.	1.399425
F-statistic	6.050502	Durbin-Watson stat	1.797897
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pengujian mendapatkan hasil nilai *adjusted R-squared* (R²) yang diperoleh sebesar 0,5178 atau 51,78%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian

ini, yaitu jumlah penduduk, PDRB, dan investasi secara simultan mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu kapasitas fiskal daerah sebesar 51,78%. Adapun sisanya sebesar 48,22% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.65696	16.10613	4.076519	0.0001
JP	-1.255690	1.070416	-1.173086	0.2428
PDRB	-2.843665	0.740390	-3.840763	0.0002
INV	0.082296	0.034368	2.394556	0.0180

Berdasarkan tabel uji statistik t dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1.173086 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar -1.973934 dan nilai $p-value$ sebesar 0,2428 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah tahun berikutnya.
2. Variabel PDRB menunjukkan t_{hitung} -3,840763 < t_{tabel} -1,973934 dengan $p-value$ 0,0002 < 0,05, sehingga PDRB berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Namun, koefisien regresi negatif mengindikasikan arah hubungan berlawanan dengan hipotesis, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. variabel investasi memperlihatkan nilai t_{hitung} 2,394556 yang lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} 1,973934 dan nilai $p-value$ sebesar 0,0180 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti investasi berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah tahun berikutnya.

Tabel 10. Uji Simultan (Uji Statistik f)

R-squared	0.620360
Adjusted R-squared	0.517830
S.E. of regression	0.385451
Sum squared resid	20.35438
Log likelihood	-60.05890
F-statistic	6.050502
Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil uji simultan (uji statistik f) diperoleh nilai f_{hitung} sebesar 6,050502 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai f_{tabel} sebesar 2,657449 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian variabel independen yang terdiri dari jumlah penduduk, PDRB, dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki nilai t_{hitung} -1.070486 > t_{tabel} -1.973934 dan nilai signifikan 0,2428 > 0,05, sehingga jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Kiziltan & Yereli, 2023;

Oki, 2019) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah. Bahkan, (Kiziltan & Yereli, 2023) menemukan bahwa daerah dengan jumlah penduduk besar justru cenderung menggunakan kapasitas fiskal yang lebih rendah karena tingginya ketergantungan pada transfer pusat dan struktur ekonomi yang tidak sepenuhnya memperluas basis pajak daerah. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk pada periode tertentu tidak akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan kapasitas fiskal daerah pada periode berikutnya.

Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja, serta tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih rendah. Apabila sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia nonproduktif atau menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, maka kontribusi terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah menjadi terbatas. Dengan demikian peningkatan jumlah penduduk tidak otomatis memperkuat kapasitas fiskal daerah dan dapat menimbulkan tantangan pengelolaan fiskal daerah (Humaira & Widyawati, 2025).

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil uji statistik t pada PDRB menunjukkan nilai $t_{hitung} -3.840763 < t_{tabel} -1.973934$ dengan $p-value$ $0.0002 < taraf$ signifikansi $0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah, namun arah hubungannya negatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Adriana & Rustam, 2024; Putri et al., 2014; Utami, 2018) yang menyatakan PDRB tidak berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah. PDRB tidak selalu mencerminkan peningkatan kemampuan fiskal daerah. PDRB hanya menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi di suatu wilayah, tetapi tidak memastikan bahwa aktivitas tersebut menjadi sumber penerimaan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. PDRB yang berpengaruh negatif berarti setiap peningkatan PDRB akan menurunkan kapasitas fiskal daerah, dan sebaliknya.

Hal ini dapat terjadi karena PDRB menunjukkan tingkat perekonomian suatu daerah, namun tidak secara langsung mencerminkan kemandirian daerah tersebut. Oleh karena itu meskipun PDRB mengalami peningkatan, kapasitas fiskal daerah tidak akan berubah jika pendapatannya tidak meningkat (Adriana & Rustam, 2024). PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar bersumber dari sektor-sektor yang menjadi kewenangan penerimaan pemerintah pusat, sehingga penerimaan daerah menjadi terbatas dan peningkatan PDRB tidak sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

3. Pengaruh Investasi Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil uji statistik t pada investasi menunjukkan nilai $t_{hitung} 2,394556 > t_{tabel} 1,973934$ dan $p-value$ $0,0180 < taraf$ signifikansi $0,05$, sehingga investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mirsan et al., 2019) yang menyatakan investasi berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, peningkatan investasi pada periode tertentu akan diikuti peningkatan kapasitas fiskal daerah pada periode berikutnya, berlaku sebaliknya.

Investasi merupakan faktor yang berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan arus investasi, baik domestik maupun asing, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi. Kondisi ini berdampak pada bertambahnya penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi, sehingga memperkuat pendapatan asli daerah. Dengan demikian, investasi memiliki keterkaitan langsung terhadap kapasitas fiskal daerah melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pajak (Amanda & Murwiati, 2025).

4. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil uji statistik f pada jumlah penduduk, PDRB, dan investasi menunjukkan nilai f_{hitung} $6,050502 > f_{tabel}$ $2,657449$ dengan signifikansi $0,000000 < 0,05$, sehingga ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mirsan et al., 2019; Wondiwoi et al., 2017) yang menyatakan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk, PDRB, dan investasi pada periode tertentu akan diikuti perubahan kapasitas fiskal daerah pada periode berikutnya.

Peningkatan kapasitas fiskal melalui jumlah penduduk, PDRB, dan investasi menunjukkan potensi daerah untuk memperluas PAD sebagai komponen penting dalam kapasitas fiskal daerah. Hal ini juga sesuai dengan ekonomi publik, yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk yang tinggi memperluas sumber penerimaan pajak, PDRB yang meningkat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang memperbesar ruang fiskal, sementara investasi mendorong aktivitas ekonomi baru yang menghasilkan tambahan penerimaan daerah.

SIMPULAN

Simpulan

1. Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,070486 < t_{tabel}$ sebesar $1,973934$ dan nilai signifikan sebesar $0,2428 > 0,05$, sehingga jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi belum tentu meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini terjadi apabila kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, sehingga kontribusinya terhadap PAD menjadi terbatas.
2. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} sebesar $-3,840763 > t_{tabel}$ sebesar $1,973934$ dan nilai signifikan sebesar $0,0002 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan PDRB berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah ditolak. Artinya, PDRB pada periode tertentu akan menurunkan kapasitas fiskal daerah pada periode berikutnya, karena pertumbuhan PDRB didominasi oleh sektor yang pajaknya dipungut pemerintah pusat, sehingga kontribusi terhadap PAD terbatas.
3. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} sebesar $2,394556 > t_{tabel}$ sebesar $1,973936$, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0180 < 0,05$. Dengan demikian, peningkatan investasi pada periode tertentu, akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah pada periode berikutnya.
4. Jumlah penduduk, PDRB, dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai f_{hitung} sebesar $6,050502 > f_{tabel}$ sebesar $2,65745$, dan nilai signifikansi sebesar $0,00000 < 0,05$. Dengan demikian, ketiga variabel independen mampu secara bersama-sama menjelaskan variasi kapasitas fiskal daerah.

Implikasi

1. Pemerintah perlu meningkatkan konsumsi dan produktivitas penduduk,
2. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja daerah untuk mencegah terjadinya *fiscal stress*, dan
3. Pemerintah perlu mendorong investasi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu, jumlah penduduk, PDRB, dan investasi, sehingga belum mampu menggambarkan keseluruhan faktor yang berperan dalam memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik fiskal dan ekonomi yang berbeda.
3. Penelitian ini menerapkan *time lag* satu tahun untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap kapasitas fiskal daerah, sehingga belum dapat menangkap pengaruh jangka panjang dari variabel-variabel tersebut.

Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti ukuran pemerintah daerah.
2. Melakukan penelitian di wilayah lain, provinsi lain atau bahkan di tingkat nasional dapat meningkatkan kemampuan generalisasi hasil penelitian.
3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara lebih terukur dan efektif.
4. Potensi investasi perlu dikelola secara sistematis agar PAD meningkat dan kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfatah, T., & Mulyani, S. (2024). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 694–701. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Adriana, M., & Rustam, R. (2024). Analisa Determinan Kemandirian Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(2).
- Amanda, S., & Murwiati, A. (2025). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2023. *Economics and Digital Business Review*, 6(2).
- Ambya, Suparta, I. W., & Putri, W. E. (2017). Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2).
- Anggraini, Y. (2018). *Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah* (T. Indocamp, Ed.). Indocamp.
- Ardiansyah, D., & Yuliawan, D. (2024). Analisis Determinasi Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera 2019. *Journal on Education*, 06(03), 17262–17273.
- Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4.
- Desmawan, D., Fitriingsih, S, R. F., Drajat, N. A., Diani, N. W., & Marlina, S. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2.
- Fitri Yenny, N., & Anwar, K. (2020). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA LHOKSEUMAWE. *Jurnal Ekonomika Unimal*, 10(2), 2615–126.
- Herdiyana. (2019). ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 112–133.

- Humaira, S., & Widyawati, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14(3).
- Istiningsih, W. D., & Bawono, A. D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Pada Periode 2019-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2).
- Kementerian Keuangan. (2023). *PMK No. 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.
- Kiziltan, M., & Yereli, A. B. (2023). Evaluating local fiscal capacity and fiscal effort of Turkish local governments: Evidence from spatial panel data analysis. *Economic Change and Restructuring*, 56(1), 441–472. <https://doi.org/10.1007/s10644-022-09424-1>
- Lisnawati, L. (2018). Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kapasitas Fiskal di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4.
- Mirsan, M. A., Hamzah, N., & Muchlis, S. (2019). Pengaruh Investasi, PDRB Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan). *Paradoks Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *PUBLIC FINANCE IN THEORY AND PRACTICE* (5th ed.). MCGRAW-HILL BOOK COMPANY.
- Mutholifa. (2019). Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Jaya Negara*, 2.
- Oki, K. K. (2019). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT Impact Of Regional Autonomy On Fiscal Capacity In The District Of Timor Tengah Utara, Ntt Province. *EKOPEM / Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 2503–3093.
- Oktavilia, S., Fafurida, Rahman, Y. A., & Silvia, R. B. (2020). Improving Regional Fiscal Capacity in Central Java Province Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 9(2), 2020. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Putri, T. K., Boedijono, & Rohman, H. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Ekonomi Publik* (M. F. Ridwan, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Soemantri, S. (2014). *Otonomi Daerah* (P. Latifah, Ed.; 1st ed.). PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Suryahadi, M. Y., & Santosa, A. B. (2024). ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DIPROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHTAHUN 2018-2022. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5).
- Syaifullah. (2021). Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Langkat. *Jurnal BONANZA*, 1(2).
- Talattov, A., Maulana, S. J., Wibowo, D. H., & Ahmad, T. (2023). KAPASITAS FISKAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SUBSIDI DAN KOMPENSASI ENERGI. *INDEF (Insitue for Development of Economics and Finance)*, 1.
- Utami, M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007-2016. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2).
- Widyaningsih, A. T. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(3), 215. <https://doi.org/10.26418/jebik.v7i3.25893>
- Wondiwoi, A., Hafizrianda, Y., & Yvonne de Quelyoe, F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal di Kota Jayapura. *Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, IV(2).